

LAPORAN KEUANGAN BP3TKI BANDUNG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3tkibdg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah

dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2019

Sebagai Kepala BP3TKI Bandung,



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	



**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BALAI PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BP3TKI) BANDUNG**

Jln. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287, Telp.Fax :022-7336965, Email : bp3tkibdg@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2019

Kepala BP3TKI Bandung,



Deta, S.H., M.M.

NIP. 196192241989121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 01 Januari sampai dengan per 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp60.657.325 atau mencapai 0,00 persen karena BP3TKI Bandung tidak mengestimasikan Anggaran Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.723.303.895 atau mencapai 95,29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp19.648.043.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.439.498.730 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.798.526.433, Aset Tetap (netto) sebesar Rp12.452.372.297 dan piutang jangka panjang sebesar Rp. 99.500.000, Aset lainnya sebesar Rp89.100.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp181.860.765 dan Rp14.257.637.965.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.945.353 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.379.284.026 sehingga

terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp19.374.338.673. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp277.255.972 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp19.097.082.701.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp14.676.729.096 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp19.097.082.701 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.677.991.570 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp14.257.633.965.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal per 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN TA 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Anggaran	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	60.657.325	0,00	60.807.735
JUMLAH PENDAPATAN		-	60.657.325	0,00	60.807.735
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.364.692.000	4.336.086.774	99,34	3.448.405.614
Belanja Barang	B.4	14.926.801.000	14.038.130.321	94,05	12.200.420.291
Belanja Modal	B.5	356.550.000	349.086.800	97,91	248.164.000
JUMLAH BELANJA		19.648.043.000	18.723.303.895	95,29	15.896.989.905

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3TKI BANDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET			
ASET LANCAR			
	C.1		
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1	12.000.000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.2	(60.000)	
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	11.940.000	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.1.4	1.786.586.433	1.819.227.409
Persediaan			
JUMLAH ASET LANCAR		1.798.526.433	1.819.227.409
ASET TETAP			
	C.2		
Tanah	C.2.1	8.573.442.000	8.573.442.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.354.424.266	6.019.268.266
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.005.458.000	3.005.458.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	13.500.000	13.500.000
Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(5.494.451.969)	(4.717.168.078)
JUMLAH ASET TETAP		12.452.372.297	12.894.500.188
PIUTANG JANGKA PANJANG			
	C.3		
Piutang Tagihan TuntuTan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	100.000.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gan	C.3.2	(500.000)	-
Piutang Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.3.3	99.500.000	
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		99.500.000	12.894.500.188
ASET LAINNYA			
	C.4		
Aset Lain-lain	C.4.1	394.764.700	531.058.075
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(305.664.700)	(439.582.075)
JUMLAH ASET TETAP		89.100.000	91.476.000
JUMLAH ASET		14.439.498.730	14.805.203.597
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	181.860.765	128.474.501
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		181.860.765	128.474.501
JUMLAH KEWAJIBAN		181.860.765	128.474.501
EKUITAS			
EKUITAS			
	C.6		
Ekuitas	C.16	14.257.637.965	14.676.729.096
JUMLAH EKUITAS		14.257.637.965	14.676.729.096
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.439.498.730	14.805.203.597

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.945.353	22.965.238
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		4.945.353	22.965.238
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.945.353	22.965.238
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	4.379.502.757	3.559.964.309
Beban Persediaan	D.3	565.286.232	1.223.512.016
Beban Barang dan Jasa	D.4	8.866.801.397	7.616.085.731
Beban Pemeliharaan	D.5	369.991.369	499.697.980
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.464.365.380	3.691.432.498
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	732.776.891	949.469.058
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	560.000	(9.085.744)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		19.379.284.026	17.531.075.848
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(19.374.338.673)	(17.508.110.610)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Penepatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	2.250.000	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		2.250.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		275.326.472	67.442.335
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		320.500	19.000
Operasional Lainnya		275.005.972	67.423.335
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		277.255.972	67.423.335
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(19.097.082.701)	(17.440.687.275)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E.1	14.676.729.096	9.889.188.406
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(19.097.082.701)	(17.440.687.275)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	4.560.497.002
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	4.560.497.002
Koreksi Nila Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
JUMLAH		-	4.560.497.002
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	18.677.991.570	17.667.730.963
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(419.091.131)	4.787.540.690
EKUITAS AKHIR	E.6	14.257.637.965	14.676.729.096

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3TKI Bandung

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984, Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep- 137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amant UU No. 39 Thun 2004 pasal 94 dan 98, maka Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BP3TKI Bandung berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang Berkualitas dan Bermartabat di wilayah Provinsi Jawa Barat”**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penempatan TKI
- Pendayagunaan Pegawai BP3TKI secara optimal
- Meningkatkan sosialisasi penempatan TKI
- Meningkatkan verifikasi administrasi secara ketat
- Meningkatkan perlindungan dan advokasi CTKI/TKI
- Meningkatkan penyiapan dan pemberangkatan CTKI

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BP3TKI Bandung. Laporan

Kuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3TKI Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3TKI Bandung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3TKI Bandung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan secara khusus direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapata-LO pada BP3TKI Bandung dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	
--	--	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP / TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP / TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama untuk periode yang berakhir periode berjalan, BP3TKI Bandung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang tidak merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2018 BP3TKI Bandung. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	4.209.046.000	4.364.692.000
Belanja Barang	15.049.897.000	14.926.801.000
Belanja Modal	389.100.000	356.550.000
Jumlah Belanja	19.648.043.000	19.648.043.000

Realisasi
Pendapatan
Rp60.657.325

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.657.325 atau mencapai 0,00 persen untuk periode yang berakhir dari estimasi pendapatan yang di tetapkan sebesar Rp0. Pendapatan BP3TKI Bandung berasal dari pendapatan sewa dan penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	60.657.325	-
Jumlah	-	60.657.325	-

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	NTB	NTPN	Jumlah
1	180118664109	412EA5NJE98IKGR2	4.718.848
2	180202218791	A0B9E46FJ9MTBR52	23.424
3	180202237079	63CA14DDUA4LG252	1.648.451
4	180202237235	03DB84DF TODNGC52	3.296.902
5	000000051140	3EFCF5BJNC8QF7G9	2.250.000
6	180419792450	A5C0C4RGFFD5M29I	3.835.950
7	180419792492	23FB64RGUJMCAM9I	9.054.000
8	180423883791	DC2BA5T412RIQBBI	23.829.750
9	180726789500	58FBA236CRESG5B2	3.000.000
10	000000092866	597D641JHC2KAU09	3.000.000
11	000000471394	8F8247AMP0ELC7G9	3.000.000
12	181121265347	5DB3F1BT3N5TM5OI	3.000.000
Jumlah			60.657.325

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu terdiri :

a. Pendapatan PNBPN yaitu terdiri :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.250.000
2.	Pendapata Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan	4.945.353
Jumlah		7.195.353

b. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yaitu terdiri :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara Thd Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.000.000
Jumlah		12.000.000

c. Pendapatan Lain-lain yaitu terdiri :

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	32.407.972
2.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	9.054.000
Jumlah		41.461.972

Realisasi Pendapatan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami penurunan 17,90 persen dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan tidak adanya sewa ruang pihak ketiga pelayanan (jasa) yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor BP3TKI Bandung dan adanya pengembalian belanja barang TAYL dan belanja pegawai TAYL.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	60.657.325	73.882.267	(17,90)
Jumlah	60.657.325	73.882.267	(17,90)

*Realisasi Belanja
Negara
Rp18.723.303.895*

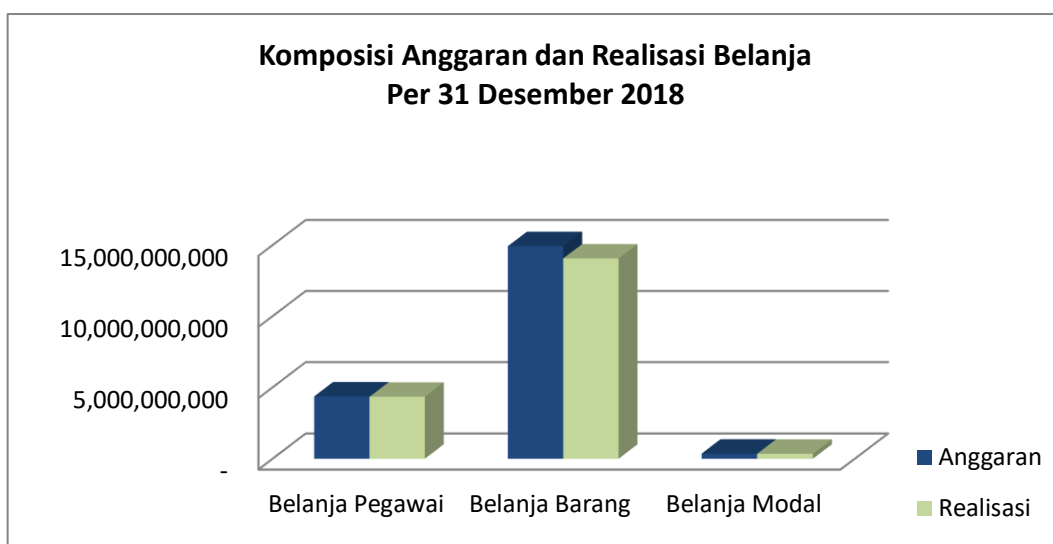
Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.723.303.895 atau 92,29 persen dari anggaran belanja sebesar Rp19.648.043.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018

URAIAN	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.364.692.000	4.340.707.997	99,45%
Belanja Barang	14.926.801.000	14.057.699.521	94,18%
Belanja Modal	356.550.000	349.086.800	97,91%
Total Belanja Kotor	19.648.043.000	18.747.494.318	95,42%
Pengembalian Belanja	-	(24.190.423)	-100,00%
Jumlah	19.648.043.000	18.723.303.895	95,29%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,15 persen dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan pangkat, pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan dimana disebabkan adanya penambahan Pegawai sebanyak 12 CPNS di Tahun 2018;
2. Adanya kegiatan tambahan operasional unit pos layanan di Kab./Kota di Jawa Barat;
3. Adanya belanja modal untuk sarana dan prasarana LTSP dan layanan kantor BP3TKI Bandung.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.336.086.774	3.448.405.614	25,74
Belanja Barang	14.038.130.321	12.200.420.291	15,06
Belanja Modal	349.086.800	248.164.000	40,67
Jumlah	18.723.303.895	15.896.989.905	17,78

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.336.086.774 dan Rp3.448.405.614 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 25,74 persen dari realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya tambahan pegawai di BP3TKI Bandung sebanyak 12 CPNS dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang;
2. Adanya pembayaran Tukin THR pada tahun 2018;
3. Adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2018	REALISASI PER 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.124.893.193	1.756.645.841	20,96
Belanja Uang Makan PNS	243.901.000	216.644.000	12,58
Uang Lembur PNS	90.538.000	102.824.000	(11,95)
Tunjangan Kinerja PNS	1.881.375.804	1.373.717.811	36,96
Jumlah Belanja Kotor	4.340.707.997	3.449.831.652	25,82
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.621.223)	(1.426.038)	224,06
Jumlah Belanja	4.336.086.774	3.448.405.614	25,74

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.038.130.321 dan Rp12.200.420.291. Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan 15,06 persen dari Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan adanya operasional LTSP Indramayu, Karawang dan Cirebon, Subang dan Sukabumi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN	Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018	Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.960.414.285	2.876.488.544	2,92
Belanja Barang Non Operasional	2.478.732.140	1.786.614.350	38,74
Belanja Jasa	3.353.837.891	2.946.698.794	13,82
Belanja Pemeliharaan	369.991.369	499.697.980	(25,96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.471.622.580	3.691.862.498	21,12
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	423.101.256	400.257.625	5,71
Jumlah Belanja Kotor	14.057.699.521	12.201.619.791	15,21
Pengembalian Belanja	(19.569.200)	(1.199.500)	1.531,45
Jumlah Belanja	14.038.130.321	12.200.420.291	15,06

Belanja Modal
Rp349.086.800

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp349.086.800 dan Rp248.164.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk periode yang berakhir perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode yang berakhir periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 40,67 persen dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 disebabkan telah direalisasikan fasilitas peralatan sarana dan prasarana LTSP Kab./Kota Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	349.086.800	248.164.000	40,67
Jumlah Belanja Kotor	349.086.800	248.164.000	40,67
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	349.086.800	248.164.000	40,67

Belanja Modal
Rp349.086.800

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp349.086.800, mengalami kenaikan sebesar 10,36 persen dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan adanya pembelian peralatan dan mesin operasional pelayanan penempatan TKI di Kab./Kota Jawa Barat.

Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan Untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Alat kantor	87.045.800	2.975.000	2.825,91
Alat rumah tangga	131.031.000	132.689.000	-1,25
Alat studio	0	5.400.000	-100,00
Alat komunikasi	7.800.000	19.750.000	-60,51
Komputer Unit	103.200.000	63.000.000	63,81
Perangkat Komputer	20.010.000	24.350.000	-17,82
Jumlah Belanja	349.086.800	248.164.000	40,67

Aset Lancar
Rp1.798.526.433

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.798.526.433 dan Rp1.819.227.409. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada BP3TKI Bandung per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	12.000.000	-
Penyisihan Piutang Tak Teragih- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(60.000)	-
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)</i>	<i>11.940.000</i>	-
Persediaan	1.786.586.433	1.819.227.409
Jumlah	1.798.526.433	1.819.227.409

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp(60.000)

C.1.1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.000 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisih	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	12.000.000	0,50%	60.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	12.000.000		60.000

Bagian Lancar Tagihan
TP/ TGR (Netto)
Rp11.940.000

C.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.940.000 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Bagian Lancar Taihan TP/TGR (Netto)	11.940.000	-
Jumlah		11.940.000	-

Persediaan
Rp1.786.586.433

C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.786.586.433 dan Rp1.819.227.409.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
Barang Konsumsi	1.786.475.283	1.819.227.409
Jumlah	1.786.475.283	1.819.227.409

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp.12.452.372.297

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.452.372.297 dan Rp0. Aset tetap merupakan aset berwujud yg mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan dan digunakan dalam kegiatan operational entitas

Rincian Aset Tetap pada BP3TKI Bandung per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut kali ini:

Keterangan	31 Des 2018	31 Des 2017
Tanah	8.573.442.000	8.573.442.000
Peralatan dan Mesin	6.354.424.266	6.019.268.266
Gedung dan Bangunan	3.005.458.000	3.005.458.000
Aset Tetap Lainnya	13.500.000	13.500.000
Akumulasi Penyusutan	(5.494.451.969)	(4.717.168.078)
Jumlah	12.452.372.297	12.894.500.188

Tanah Rp8.573.442.000

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BP3TKI Bandung Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	8.573.442.000
Mutasi tambah:	
Tranfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Tanah	-
Penghapusan Tanah <i>Idle</i>	-
Saldo per 31 Agustus 2018	8.573.442.000

Transaksi Transfer Masuk Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan nilai aset Tanah seluas 943,00 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m2	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8.573.442.000
Jumlah			8.573.442.000

Peralatan dan Mesin
Rp6.354.424.266

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Rp6.354.424.266 dan Rp6.019.268.266 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	6.019.268.266
Mutasi Tambah:	412.136.800
Pembelian	349.086.800
Transfer masuk	63.050.000
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi Kurang:	76.980.800
Extrakomptable	76.980.800
Reklasifikasi keluar	0
Saldo per 31 Desember 2018	6.354.424.266
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-5.387.114.183
Nilai Buku per 31 Desember 2018	967.310.083

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

➤ Mutasi transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 senilai Rp349.086.800:

1. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.177/BP3TKI-6/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp151.018.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	LCD Projector/Infocus (Infocus IN 2124)	2	Rp 13.925.000	Rp 27.850.000
2	A.C. Split (Midea 09CRN1)	4	Rp 4.750.000	Rp 19.000.000
3	Portable Air Conditioner (alat Pendingin) (Midea AC120-15C)	2	Rp 1.978.000	Rp 3.956.000
4	Wireless Amplifier (Dusen Berg YMA 12)	2	Rp 3.900.000	Rp 7.800.000
5	Meja Kerja Kayu (Koenig KG MK 120)	2	Rp 1.700.000	Rp 3.400.000
6	Filing Cabinet Besi (Lion L44)	2	Rp 2.600.000	Rp 5.200.000
7	White Board (Sakura WB 1224)	2	Rp 1.131.000	Rp 2.262.000
8	Laptop (Asus A456UR i5 7200U)	2	Rp 14.900.000	Rp 29.800.000
JUMLAH				Rp 99.268.000

b. Exstrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Kursi Besi/Metal (Kursi PAP) (Futura FTR 747)	100	Rp 500.000	Rp 50.000.000
2	Dazumba 166DW)	2	Rp 875.000	Rp 1.750.000
JUMLAH				Rp 51.750.000

2. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor :

BA.186/BP3TKI-6/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 senilai Rp33.925.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	LCD Projector/Infokus (Infocus IN2124)	1	Rp 13.925.000	Rp 13.925.000
JUMLAH				Rp 13.925.000

b. Ekstrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Kursi Besi/Metal (Futura FTR 747)	40	Rp 500.000	Rp 20.000.000
JUMLAH				Rp 20.000.000

3. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : 07/PB/DSP/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp37.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

c. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	LCD Projector/Infokus (Infocus IN2124)	1	Rp 13.900.000	Rp 13.900.000
2	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) (Midea AC120-15C)	2	Rp 1.950.000	Rp 3.900.000
3	Filing Cabinet Besi (Lion L44)	1	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000
4	Laptop (Asus A4422UQ) i5 72 7200U)	1	Rp 14.900.000	Rp 14.900.000
5	White Board (Sakura WB 1224)	1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
JUMLAH				Rp 36.600.000

d. Ekstrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Speaker Komputer (Dazumba 116DW)	1	Rp 900.000	Rp 900.000
JUMLAH				Rp 900.000

4. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BAST.12/YA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp37.275.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Lemari Es (Midea HS-65LSilver)	1	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000
2	A.C. Split (LG T19EMVUKOT)	3	Rp 8.575.000	Rp 25.725.000
3	A.C. Split (Politron)	2	Rp 3.250.000	Rp 6.500.000
4	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) (Midea Type AC120-15C)	2	Rp 1.850.000	Rp 3.700.000
5	Lemari Penyimpanan	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
JUMLAH				Rp 47.275.000

5. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.807/BP3TKI-6/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp30.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Laptop (HP Probook 430 G3/i7)	2	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
JUMLAH				Rp 30.000.000

6. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.785/BP3TKI-6/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp11.960.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Printer (Peralatan Personal Komputer) (HP Laserjet M1320fn)	4	Rp 2.990.000	Rp 11.960.000
JUMLAH				Rp 11.960.000

7. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.807/BP3TKI-6/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp3.508.800 dengan rincian sebagai berikut :

a. Ekstrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Mesin Absensi	4	Rp 877.200	Rp 3.508.800
JUMLAH				Rp 3.508.800

8. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.784/BP3TKI-6/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp5.400.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Printer (Peralatan Personal Komputer) Brother MFC L2700D)	2	Rp 2.700.000	Rp 5.400.000
JUMLAH				Rp 5.400.000

9. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.790/BP3TKI-6/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp28.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Intrakomptable

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	P.C Unit	2	Rp 14.250.000	Rp 28.500.000
JUMLAH				Rp 28.500.000

- Mutasi transaksi Transfer Masuk peralatan dan mesin Per 31 Desember 2018 senilai Rp63.050.000:

1. Transfer Masuk dari Deputi Penempatan BAST Nomor : BA.01/PE/II/2018 Tanggal 08 Februari 2016 senilai Rp30.690.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Finger Print Secugem (Finger Printer Time and Attendance Acces Control System)	6	Rp 3.069.000	Rp 18.414.000	SPK.998/PEN-PPK/X/2015 Tanggal 28-12-2015
2	Finger Print Secugem (Finger Printer Time and Attendance Acces Control System)	4	Rp 3.069.000	Rp 12.276.000	SPK.998/PEN-PPK/X/2015 Tanggal 28-12-2015
JUMLAH				Rp 30.690.000	

2. Transfer Masuk dari Biro Keuangan dan Umum BAST Nomor : BA.100/SU-KU/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp19.360.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	PC. Desktop Lenovo	2	Rp 9.680.000	Rp 19.360.000	SPK.279/SU-PAN/2013 Tanggal 02 Juli 2013
JUMLAH				Rp 19.360.000	

3. Transfer Masuk dari Biro Keuangan dan Umum BNP2TKI BAST Nomor : BA.972/SU-KU/XII/2018 Tanggal 22 September 2018 senilai Rp13.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	P.C Unit	2	Rp 6.500.000	Rp 13.000.000	BA.972 Tanggal 28 Desember 2011
JUMLAH				Rp 13.000.000	

Gedung dan Bangunan
Rp3.005.458.000

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Rp3.005.458.000 dan Rp3.005.458.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	3.005.458.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2018	3.005.458.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(107.337.786)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	2.898.120.214

Tidak ada transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari Sekretariat Utama BNP2TKI.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp13.500.000

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp13.500.000 dan Rp.13.500.000. Aset tetap tersebut berupa monografi.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.494.451.969)

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp5.494.451.969 dan Rp4.717.168.078. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.573.442.000	0	8.573.442.000
2	Peralatan dan Mesin	6.354.424.266	5.387.114.183	967.310.083
3	Gedung dan Bangunan	3.005.458.000	107.337.786	2.898.120.214
4	Aset Tetap Lainnya	13.500.000	0	13.500.000
Akumulasi Penyusutan		17.946.824.266	5.494.451.969	12.452.372.297

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp100.000.000

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp0.

Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	30 Des 2018	31 Des 2017	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	100.000.000	-	-
Jumlah	100.000.000	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp(500.000)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember Rp500.000 dan Rp0.

Rangkuman Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	500.000	-	0
Jumlah	500.000	-	0

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/TGR
Rp99.500.000

C.3.3 Piutang Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp99.500.000 dan Rp0.

Rangkuman Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2018 tersaji pada table berikut :

Rincian Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017	Kenaikan (penurunan)	%
Tagihan TP/TGR (Netto)	99.500.000	-	0	0
Jumlah	99.500.000	-	0	0

C.4 Aset Lainnya

Aset Lain-Lain
Rp394.764.700

C.4.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp394.764.700 dan Rp531.058.075. Aset Lain-lain merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

C.4.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Tetap Rp305.664.700

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Agustus 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp305.664.700 dan Rp439.582.075. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi penyusutan Barang Milik Negara dari Aset yang dihentikan penggunaan operasional pemerintah.

C.5 Kewajiban

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp181.860.765

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp181.860.765 dan Rp128.474.501. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang tersebut merupakan tagihan konsumsi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bulan Desember 2018.

Ekuitas
Rp14.257.637.965

C.6 Ekuitas

C.6.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.257.637.965 dan Rp14.676.729.096. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.945.353 dan Rp22.965.238. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan jasa berasal dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari transaksi tahun 2018. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Jasa	4.945.353	22.965.238	78,47
Jumlah	4.945.353	22.965.238	78,47

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.379.502.757 dan Rp3.559.964.309. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 AGUSTUS 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.711.187.040	1.435.912.600	19,17
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.002	22.209	39,59
Beban Tunjangan-Tunjangan	413.675.151	320.711.032	28,99
Beban Uang Makan	267.176.000	216.644.000	23,32
Beban Lembur	90.538.000	102.824.000	(11,95)
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja)	1.901.516.787	1.485.276.506	28,02
Jumlah	4.384.123.980	3.561.390.347	23,10
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-100	-38	163,16
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	-1.056.000	(100,00)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-1.110.000	-370.000	200,00
Pengembalian Beban Tunjangan Kinerja PNS	-3.511.123	0	100,00
Jumlah	4.379.502.757	3.559.964.309	23,02

Beban Persediaan
Rp565.286.232

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp565.286.232 dan Rp1.223.512.016. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat penggunaan atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	565.286.323	1.223.512.016	(53,80)
Jumlah	565.286.323	1.223.512.016	(53,80)

Beban Barang dan Jasa
Rp8.866.801.397

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.866.801.397 dan Rp7.616.085.731. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban barang dan jasa terjadi karena adanya operasional LTSP di 5 lokasi Kab./Kota di Jawa Barat. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.560.465.864	1.983.789.654	29,07
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.028.421	8.528.890	(17,59)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	392.920.000	884.170.000	(55,56)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satke	-12.312.000	-769.500	(100,00)
Beban Bahan	2.225.007.140	1.562.314.350	42,42
Beban Barang Non Operasional Lainnya	266.450.000	224.300.000	18,79
Beban Langganan Listrik	217.332.336	233.866.077	(7,07)
Beban Langganan Telepon	11.696.180	35.886.914	(67,41)
Beban Langganan Air	398.600	14.328.300	(97,22)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	67.835.776	4.409.244	100,00
Beban Jasa Sewa	1.785.940.280	1.376.886.802	29,71
Beban Jasa Profesi	1.267.880.000	847.200.000	49,66
Beban Jasa Lainnya	0	441.175.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesi	76.158.800	0	100,00
Jumlah	8.866.801.397	7.616.085.731	16,42

Beban
Pemeliharaan
Rp369.991.369

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp369.991.369 dan Rp499.697.980. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	369.991.369	499.697.980	(25,96)
Jumlah	369.991.369	499.697.980	(25,96)

Beban Penyusutan
Dan Amortisasi
Rp732.776.891

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp732.776.891 dan Rp948.469.058. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	658.842.367	845.585.189	(22,08)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.558.524	100.507.869	(28,80)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.376.000	2.376.000	100,00
Jumlah Penyusutan	732.776.891	948.469.058	(22,74)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	732.776.891	948.469.058	(22,74)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp560.000

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp560.000 dan Rp9.085.744. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0	9.085.744	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	60.000	0	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih JP - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	500.000	0	100,00
Jumlah	560.000	9.085.744	(93,84)

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp2.250.000

D.9 Kegiatan Non Operasional

D.9.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan penjualan aset non lancar, maka harus ada Akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.250.000	0	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Jumlah Surplus/(Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	2.250.000	0	100,00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya yaitu hasil penjualan lelang dari penghapusan Aset BMN yang rusak berat pada satker BP3TKI Bandung.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp275.326.472

D. 9.2 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp275.326.472 dan Rp47.442.335. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN PENDAPATAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	124.000.000	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	32.407.972	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	9.054.000	41.831.285	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	109.864.500	25.611.050	328,97
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	275.326.472	67.442.335	308,24

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp320.500

D.9.3 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp320.500 dan Rp19.000. Beban Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Kerugian Persediaan Rusak/Usang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017

URAIAN BEBAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	TAHUN 2018	TAHUN 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	320,500	19,000	1,587
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	320,500	19,000	1,587

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ini disebabkan adanya koreksi kurang dan koreksi tambah dari barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat menjadi barang konsumsi yang dimana pada saat dilakukan

pengirim ADK Persediaan dan ADK aplikasi Simak BMN ke Aplikasi SAIBA terjadi pemecahan yang semula Akun 39 terbagi menjadi 2 bagian yaitu 49 Kredit dan 59 Debet. Sehingga menimbulkan Beban Penyesuain Nilai Persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp14.676.729.096

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.676.729.096 dan Rp9.889.188.406.

Defisit LO

Rp(19.097.082.701)

E.2 (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp19.097.082.701 dan Rp17.440.687.275 Defisit LO merupakan selisih antara defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.2.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp4.560.497.002. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penilaian ulang Tanah dan Bangunan BP3TKI Bandung.

Transaksi Antar

Entitas

Rp18.677.991.570

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18.677.991.570 dan Rp17.667.730.963. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.723.303.895	15.896.989.905
Diterima ke Entitas Lain	(60.657.325)	(73.882.267)
Transfer Masuk	15.345.000	1.844.623.325
Jumlah	18.677.991.570	17.667.730.963

E.3.1 Diterima Entitas Lainnya (DDE/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas pendapatan (BUN). Pada untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 DKEL sebesar Rp18.723.303.895 dan Rp15.896.989.905 sedangkan DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp60.657.325 dan Rp73.882.267.

E.3.2 Transfer Masuk/Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL, KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp15.345.000 dan Rp1.844.6236.325 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Peralatan dan Mesin	Deputi Penempatan BNP2TKI	15.345.000	-
2	Peralatan dan Mesin	Sekretaris Utama BNP2TKI		18.554.000
3	Peralatan dan Mesin	Deputi Penempatan BNP2TKI		180.840.000
4	Peralatan dan Mesin	Deputi Perlindungan BNP2TKI		15.257.700
5	Peralatan dan Mesin	Kemenaker RI		495.588.075
6	Gedung dan Bangunan	Kemenaker RI		118.800.000
7	Tanah	Kemenaker RI		1.581.200.000
	Jumlah		15.345.000	2.410.239.775

Sedangkan Transfer Keluar untuk periode berakhir 31 Desember 2018 tidak ada perpindahan Aset maupun Persediaan.

*Kenaikan/
Penurunan Ekuitas
Rp419.091.131*

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp419.091.131 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp4.787.540.690.

*Ekuitas Akhir
Rp14.257.637.965*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.257.637.965 dan Rp14.676.729.096.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada kejadian penting yang tercatat temuan dan tindak lanjutan temuan BPK.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Tidak ada daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah Bank BRI A/C 0005-01-001570-30-5 a.n. Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung.

Surat Pengesahan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung dari KPPN Bandung I sesuai surat Nomor : S-297/WPB.13/KP.0121/2011 tanggal 24 Januari 2011.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP.95/KA/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan BNP2TKI Tahun Anggaran 2018. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Barang/Jasa dan Pengelola Barang Milik Negara pada Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung maka pada tanggal 02 Januari 2017 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan. Perubahan Pengelola Keuangan untuk periode yang

berakhir 01 Agustus 2018 di BP3TKI sebagai berikut :

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1.	Penandatanganan SPM	Dra. Lismia Elita,M.M.	Neng Wepi, S.H., M.H
2.	Bendahara Pengeluaran	Rintan Septearima,S.H	Rd. Panji Satraidi P. S.E
3.	Bendahara Pengeluaran	Rd. Panji Satraidi P. S.E	Farisa Ulfa, S.Psi.

- b. Terdapat 3 jurnal tidak lazim dengan akun 132211 senilai Rp51.750.000, Rp20.000.000, Rp.900.000 dan Rp3.508.800 karena adanya pembelian belanja modal terdapat rincian detail barang dimana Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan Revaluasi BMN bahwa PMK 181/PMK.06/2017 merupakan perubahan dari PMK 120/PMK.06/2007 terkait dengan penatausahaan barang milik negara.